



Mojokerto
Full of Majapahit Greatness

RENCANA KERJA



RENJA



TAHUN 2027



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MOJOKERTO**

KATA PENGANTAR

Pembangunan adalah merupakan upaya perubahan ke arah yang lebih baik dalam rangka meningkatkan harkat, martabat dan kecerdasan masyarakat, dilaksanakan secara bertahap, terpadu dan berkelanjutan. Wujud dari pelaksanaan pembangunan secara konkrit antara lain direalisasikan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang dibiayai dengan anggaran Pemerintah yaitu APBD.

Untuk melaksanakan tahapan pembangunan diperlukan dokumen perencanaan, baik jangka menengah ataupun jangka pendek (satu tahun). Untuk dokumen lima tahunan telah disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 – 2029, sedangkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2027 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2027.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2027 menggambarkan program dan kegiatan serta anggaran indikatif selama satu tahun kedepan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2027 berfungsi sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2027.

Demikian kami berharap dengan telah disusunnya Dokumen Rencana Kerja (Renja) ini dapat memberikan arah pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto selama satu tahun kedepan.

Mojokerto, Juli 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN MOJOKERTO


SUGENG NURYADI, SIP., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19681010 198903 1 008

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penyusunan	6
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	22
2.4. Review terhadap Rancangan RKPD	25
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	41
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	47
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	47
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	52
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	55
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	74
BAB V PENUTUP	88
5.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja	88
5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan	89
5.3. Rencana Tindak Lanjut	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2027 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2027. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, Renja Provinsi dan Renja K/L, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan RAPBD. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto. Keduanya merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kabupaten Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tahun sebelumnya dan mengakomodasikan, mempertimbangkan berbagai Kebijakan Pemerintah Daerah, Provinsi dan Nasional serta penjangkaran aspirasi secara bertahap melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan mulai dari Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Forum SKPD yang selanjutnya diformulasikan melalui Musrenbang Kabupaten Mojokerto. Jadi Rencana Kerja DPMD disusun dengan berdasarkan pola kombinasi pendekatan secara terpadu yaitu pendekatan secara teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom up dan top down process.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan DPMD yang memuat rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto selama kurun waktu satu tahun kedepan. Selanjutnya secara teknis operasional disusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA SKPD) yang merupakan penjabaran teknis dan anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA SKPD) ini merupakan bagian dari proses penyusunan Rencana Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD).

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto ini merupakan dokumen perencanaan DPMD yang memberikan arahan kemampuan dan kemandirian masyarakat baik dibidang sosial budaya, kelembagaan, ekonomi maupun teknologi terapan sehingga masyarakat dapat mengaktualisasikan diri, meningkatkan harkat dan martabatnya serta mengembangkan kemandirian secara maksimal.

Dengan demikian Rencana Kerja Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu pada RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2027 dan Program Strategis Nasional Tahun 2027 yang ditetapkan oleh Pemerintah. Serta menjadi acuan bagi daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman

dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2027.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2027 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47

- Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 11. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang rencana HAM tahun 2021 -2027;
 12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2027 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 14. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2010 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kab Mojokerto nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kab Mojokerto nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029;
25. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto;
26. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 33 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 30 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2027;
28. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Nomor : 188.45/4/KEP/416-112/2026 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2027 adalah sebagai arah dan pedoman bagi upaya penjabaran penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, sehingga para pelaksana pembangunan daerah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah.

Adapun tujuannya adalah agar pembangunan di Kabupaten Mojokerto sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan dilakukan secara terukur, terarah dan terpadu secara konsisten, agar berhasil sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latarbelakang penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Renja Perangkat Daerah serta Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2027.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.4. Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Bab ini menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4. Review terhadap Rancangan RKPD.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan dalam bab ini berisi penjabaran visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, program, dan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam RPJMD.

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan mengenai penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran berdasarkan atas isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :

- Jumlah program dan kegiatan.
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup yang menjelaskan :

- catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan,
- Kaidah-kaidah pelaksanaan,
- Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bahwa dalam penyusunan Program dan Kegiatan di Renja Perangkat Daerah ini, kami mengacu dan berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Mojokerto. Oleh karena itu penyusunan Renja Perangkat Daerah ini kami kerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD Kabupaten Mojokerto, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam: “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah”

Sedangkan untuk capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan tahun 2025 pada umumnya tercapai dengan baik. Berdasarkan Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto sampai dengan triwulan IV Tahun 2025, Strategi pencapaian tujuan dan sasaran diuraikan dalam, 5 (lima) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) Sub Kegiatan. Dalam pelaksanaannya, strategi pencapaian tujuan dan sasaran tersebut didistribusikan ke sekretariat dan bidang-bidang yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Pelaksanaan Program dan kegiatan DPMD sampai dengan triwulan IV Tahun 2025 secara umum sudah selaras dengan RENCANA KERJA dan RENSTRA DPMD.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan VI tahun 2025, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah triwulan IV Tahun 2025 dan atau realisasi APBD Tahun 2025. Untuk mengetahui hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan IV tahun 2025 dan realisasi Renja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 2.1. (T-C.29) dibawah ini :

Tabel 2.1. (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Triwulan IV Tahun 2025
Kabupaten Mojokerto

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (2025)			Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Th. Berjalan (2026)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi Tahun 2025 (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan & Sub Keg. s/d Th. berjalan (TW 1 Th. 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	1	3			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
2	1	3	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,75 (A)	85,3 (A)	85,5 (A)	85,66 (A)	100,19 %	85,7 (A)	-	-
						Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Jenis inovasi	3 Jenis inovasi	3 Jenis inovasi	3 Jenis inovasi	100 %	3 Jenis inovasi	3 Jenis inovasi	100 %
						Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	90,9	-	-	-	-	90,9	-	-
						Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94,94%	94,93%	94,94%	95,27%	98%	94,3%	18,86	19,7 %

2	1 3	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94,94%	94,93%	94,94%	95,27%	98%	94,3%	18,86	19,7 %
						Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	100 %					100 %		
2	1 3	0 1	2.0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 orang/ 14 bulan	31 orang/ 14 bulan	31 orang/ 14 bulan	31 orang/ 14 bulan	100%	32 orang/ 14 bulan	31 orang/ 14 bulan	100%
2	1 3	0 1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	86,04%	84,7%	86,04%	84,62%	97%	84,7%	-	-
2	1 3	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	90%	90%	90%	90%	100%	90%	25%	27%
2	1 3	0 1	2.0 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	3 Paket	1 Paket	33,3%
2	1 3	0 1	2.0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 paket	24 paket	24 paket	24 paket	100%	24 paket	6 paket	25%
2	1 3	0 1	2.0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	1 Paket	25%
2	1 3	0 1	2.0 6	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	4 Dokumen	25%
2	1 3	0 1	2.0 6	0 7	Penyediaan Bahan/material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	1 Paket	25%

2	1 3	0 1	2.0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan	4 Laporan	25%
2	1 3	0 1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	1 3	0 1	2.0 7	0 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	100%
2	1 3	0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	90%	90%	90%	90%	100%	90%	22 %	25%
2	1 3	0 1	2.0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	4 Laporan	25%
2	1 3	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	90%	94%	90%	94%	104,4%	90%	74%	82 %
2	1 3	0 1	2.0 9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	100%	12 Unit	3 Unit	25 %

2	1 3	0 1	2.0 9	0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	100%	20 Unit	5 Unit	25%
2	1 3	0 2			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa dengan penataan desa sesuai ketentuan	55%	32,44%	40%	32,44%	100%	20%	20%	100%
2	1 3	0 2	2.0 1		Penyelenggaraan Penataan desa	Jumlah desa yang sudah tertata sesuai dengan ketentuan	117 Desa	43 Desa	97 Desa	97 Desa	100%	117 Desa	97 Desa	82,9 %
2	1 3	0 2	2.0 1	0 6	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	5 Unit	5 Unit	5 Unit	54 Unit	100%	4 Unit	-	-
2	1 3	0 2			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase kerja sama antar desa yang berjalan dengan baik	74%	72%	72%	72%	100%	74%	78,2%	102%
2	1 3	0 2	2.0 1	0 2	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerja sama Antar Desa	220 Desa	220 Desa	220 Desa	220 Desa	100%	220 Desa	54 Desa	24,5%
2	1 3	0 2	2.0 1	0 3	Fasilitasi Kerja sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	1 Dokumen	50%
2	1 3	0 2	2.0 1	0 6	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	-
2	1 3	0 4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat	93%	99,41%	91%	99,41%	109,2%	93%	88,29%	94,3%

2	1 3	0 4	2.0 1		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Pemerintahan Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya	35%	-	-	-	-	35%	15%	43%
2	1 3	0 4	2.0 1	0 1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	1 Dokumen	33,3%
2	1 3	0 4	2.0 1	0 2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	100%	50 Dokumen	-	-
2	1 3	0 4	2.0 1	0 3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	299 Dokumen	299 Dokumen	299 Dokumen	299 Dokumen	100%	299 Dokumen	-	-
2	1 3	0 4	2.0 1	0 4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	299 Dokumen	299 Dokumen	299 Dokumen	299 Dokumen	100%	299 Dokumen	299 Dokumen	100%
2	1 3	0 4	2.0 1	0 5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100%	100 Orang	-	-
2	1 3	0 4	2.0 1	0 8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	100%	50 Dokumen	-	-
2	1 3	0 4	2.0 1	1 0	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	3 Laporan	25%
2	1 3	0 4	2.0 1	1 1	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	304 Dokumen	304 Dokumen	304 Dokumen	304 Dokumen	100%	304 Dokumen	85 Dokumen	27,9 %

2	1 3	0 4	2.0 1	1 3	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	36 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	100%	36 Dokumen	-	-
2	1 3	0 4	2.0 1	1 5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	299 Orang	299 Orang	144 Orang	144 Orang	100%	299 Orang	-	-
2	1 3	0 4	2.0 1	1 7	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	100%	24 Dokumen	6 Dokumen	25%
2	1 3	0 4	2.0 1	1 8	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	304 Dokumen	304 Dokumen	304 Dokumen	304 Dokumen	100%	304 Dokumen	-	-
					Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif	86%	88%	86%	88%	102,32 %	86%	88%	102,32%
2	1 3	0 5	2.0 1		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Kegiatan Berbasis Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat	20%	19%	19%	19%	100%	20%	4%	25%

2	1 3	0 5	2.0 1	0 3	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	100%	60 Dokumen	18 Dokumen	30%
2	1 3	0 5	2.0 1	0 3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	479 Lembaga	479 Lembaga	479 Lembaga	479 Lembaga	100%	479 Lembaga	100 Lembaga	20,8%
2	1 3	0 5	2.0 1	0 7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	100%	18 Laporan	-	-
2	1 3	0 5	2.0 1	0 8	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	10 Dokumen	9 Dokumen	8 Dokumen	9 Dokumen	112,50 %	10 Dokumen	2 Dokumen	20%
2	1 3	0 5			Program Pemberdayaan Lembaga	Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif	79%	78 %	74%	78,99%	106,74 %	79 %	78,03%	98%

					Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat									
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Ekonomi Produktif dan diberdayakan	70%	70%	70%	70%	100%	70%	70%	100%
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	1 Dokumen	33,,3%
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	-	-

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten.

Melihat kondisi tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan program/kegiatan dalam rangka :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Mengoptimalkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Program kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun 2025 - 2029, hasil pencapaian kinerja dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator – indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak akan menjadi tolok ukur kinerja. Tolok ukur kinerja yang telah ditentukan sebagai dasar untuk

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Adapun tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 2.2. (T-C.30) berikut dibawah ini :

Tabel 2.2. (T-C. 30)

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto
Tahun 2021 – 2025**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian					Proyeksi	Catatan Analisis
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	Indeks Desa Membangun		IKK	SDG's	0,7380	0,7535	0,7690	0,7845	0,8000	0,8156	0,7453	0,7663	0,7690	0,8492	-	-	IKD terlampaui
2	Indeks Desa		IKK	SDG's	-	-	-	-	81,63 %	83,13 %	-	-	-	-	84,47 %	84,47 %	IKD terlampaui
3	Jumlah Desa Tertinggal berdasarkan Indeks Desa Membangun		IKK	SDG's	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IKK terpenuhi
4	Jumlah Desa berkembang berdasarkan Indeks Desa Membangun		IKK	SDG's	80	60	40	20	10	0	102	63	0	0	0	0	IKK terpenuhi
5	Jumlah Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun		IKK	SDG's	40	50	58	66	72	78	45	69	219	299	299	299	IKK dan IKU terlampaui
6	Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif		-	-	70 %	72 %	74 %	76 %	78 %	80 %	70,03 %	74,48 %	78 %	78 %	79 %	80 %	IKU terlampaui
7	Persentase lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang aktif		-	-	85 %	85 %	86 %	87 %	88 %	89 %	86 %	88 %	88 %	89 %	89,65 %	89 %	IKU terlampaui

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kabupaten Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok dan fungsi organisasi dan tata kerja sebagai berikut :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengacu pada Sasaran Pemda pada RPJMD Tahun 2025 - 2029 sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah. Keberhasilan pencapaian Tujuan Perangkat Daerah ini diperoleh dari indikator kinerja tujuan: "Indeks Desa" terealisasi menjadi **84,47 %** dari target kinerja sebesar **81,63 %**, sehingga persentase tingkat capaian kinerjanya sebesar **103,48 %**. Dari nilai rata-rata Indeks Desa tersebut, maka secara rata-rata strata perkembangan desa di Kabupaten Mojokerto adalah sudah masuk kategori Desa Mandiri.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi :

- a. Masih belum terwujudnya kesejahteraan masyarakat, persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat.

- b. Adanya pasar bebas atau era globalisasi.
- c. Sumberdaya alam yang melimpah, belum secara optimal dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
- d. Perubahan paradigma Pemerintah (Government) menjadi Tata Pemerintahan (Governance).
- e. Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni dari pembangunan ke pemberdayaan.
- f. Masih kurang optimalnya keswadayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan program kegiatan untuk mewujudkan tujuan pemberdayaan masyarakat dan desa serta pencapaian target masih belum mencapai titik yang optimal, hal tersebut dikarenakan :

1. Masih lemahnya mekanisme monitoring, evaluasi dan pendampingan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa;
2. Belum optimalnya peran aktif kelompok masyarakat tertentu dalam pembangunan, bahwa tidak semua masyarakat terlibat dalam pemberdayaan masyarakat desa.
3. Masih kurangnya akses/informasi bagi masyarakat desa mengenai program pemberdayaan masyarakat desa;
4. Belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Peran besar yang diterima oleh desa dengan adanya ADD dan Dana Desa, tentunya harus disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.
5. DPMD sudah sering melakukan pembinaan terhadap Kades dan Perangkat Desa, baik melalui sosialisasi, Bimtek maupun diklat. Namun faktanya, masih banyak Kades atau Perangkat Desa yang tidak memahami substansi dari pembinaan yang dilakukan.
6. Belum optimalnya saluran pengaduan masyarakat untuk melaporkan kinerja perangkat desa yang mal-administrasi.
7. Kurang adanya kesinambungan suatu kegiatan/program, terutama untuk program pemberdayaan yang membutuhkan skema keberlanjutan sampai

periode tertentu, tidak semua hasil pemberdayaan dapat diikuti dengan pembinaan lebih lanjut.

8. Masih kurangnya peningkatan pengembangan usaha ekonomi.
9. Masih kurangnya peningkatan penguatan kelembagaan dan pengembangan SDM di tingkat desa

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu strategis yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan etika birokratis.

Analisis lingkungan strategis adalah deskripsi mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan terdiri atas faktor kekuatan organisasi dan kelemahan organisasi.

Faktor Kekuatan Organisasi :

- 1) Adanya produk hukum/Peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 2) Adanya Peraturan perundang-undangan yang mendukung penanggulangan kemiskinan;
- 3) Adanya pendampingan (Kerjasama dengan Perguruan Tinggi).

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis yang karena berada pada lingkungan eksternal organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor

strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi. Faktor eksternal antara lain :

1. Sering berubahnya regulasi yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
2. Masih lemahnya koordinasi antar sektor.

Faktor Peluang Organisasi :

- a. Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dengan strategi pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada masyarakat pedesaan, mengedepankan partisipasi rakyat serta pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin;
- b. Perubahan paradigma pembangunan yang menitik beratkan pada menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang;
- c. Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;
- d. Keterbukaan Informasi dan Teknologi Informasi yang terus berkembang;
- e. Tingginya keinginan masyarakat dalam pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Teknologi Tepat Guna.

2.4. Review terhadap Rancangan RKPD

Berdasarkan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2027 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam membangun kemandirian ekonomi dan sosial budaya yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sinergitas program dengan Pemerintah Pusat terkait dengan percepatan penanggulangan kemiskinan.

Restrukturisasi Program/Kegiatan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan program/kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2030 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2030. Selengkapnya sebagaimana pada tabel 2.3. berikut :

Tabel 2.3. (T-C.31)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2027
Kabupaten Mojokerto

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTTIN G
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp.)	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6,428,688,094	2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5,950,589,280	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Kab. Mojokerto	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	90,9	6,428,688,094	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Kab. Mojokerto	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	90,9	5,950,589,280	
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94,4%				Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94,4%		
2.13.01.2.01 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.13.01.2.01 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Kinerja Perangkat Daerah yang tercapai	94%	40,000,000	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Kinerja Perangkat Daerah yang tercapai	94%	-	
2.13.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2.13.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	20,000,000	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	-	
2.13.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.13.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 laporan	20,000,000	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	-	
2.13.01.2.02 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.13.01.2.02 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	100%	5,177,038,094	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	100%	5,079,203,680	
2.13.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS					2.13.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS					
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/ 14 bulan	5,177,038,094	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/ 14 bulan	5,079,203,680	
2.13.01.2.05 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					2.13.01.2.05 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Peran					
Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	84.8	85,000,000	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	84.8	-	
2.13.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					2.13.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	35 paket	35,000,000	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	-	

2.13.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					2.13.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	34 orang	50,000,000	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	-	
2.13.01.2.06 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.13.01.2.06 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	90%	539,000,000	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	90%	390,600,000	
2.13.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					2.13.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	175,000,000	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	150,000,000	
2.13.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					2.13.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	58,000,000	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	24,000,000	
2.13.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					2.13.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	55,000,000	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	20,000,000	
2.13.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					2.13.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokum en	6,000,000	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokum en	4,000,000	
2.13.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan / Material					2.13.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan / Material					
Tersedianya Bahan/Material	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	105,000,000	Tersedianya Bahan/Material	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	102,000,000	
2.13.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					2.13.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	140,000,000	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	90,600,000	
2.13.01.2.07 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.13.01.2.07 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	100%	55,000,000	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	100%	-	
2.13.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel					2.13.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel					
Tersedianya Mebel	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	55,000,000	Tersedianya Mebel	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0		
2.13.01.2.08 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.13.01.2.08 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	Kab. Mojokerto	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	90%	200,900,000	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	Kab. Mojokerto	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	90%	220,785,600	

2.13.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					2.13.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8,900,000	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
2.13.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					2.13.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	192,000,000	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	220,785,600	
2.13.01.2.09 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.13.01.2.09 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	90%	331,750,000	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	90%	260,000,000	
2.13.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					2.13.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	171,750,000	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	195,000,000	
2.13.01.2.09.0009 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					2.13.01.2.09.0009 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	125,000,000	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	45,000,000	
2.13.01.2.09.0010 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					2.13.01.2.09.0010 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	35,000,000	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	20,000,000	
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA				200,000,000	2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA				175,000,000	
Meningkatnya kualitas penataan desa	Kab. Mojokerto	Persentase desa dengan penataan desa sesuai ketentuan	55%	200,000,000	Meningkatnya kualitas penataan desa	Kab. Mojokerto	Persentase desa dengan penataan desa sesuai ketentuan	55%	175,000,000	
2.13.02.2.01 - Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa					2.13.02.2.01 - Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa					
Meningkatnya Desa yang Tertata	Kab. Mojokerto	Jumlah desa yang sudah tertata sesuai dengan ketentuan	164 Desa	200,000,000	Meningkatnya Desa yang Tertata	Kab. Mojokerto	Jumlah desa yang sudah tertata sesuai dengan ketentuan	164 Desa	175,000,000	
2.13.02.2.01.0006 - Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa					2.13.02.2.01.0006 - Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa					
Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	5 Unit	200,000,000	Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	5 Unit	175,000,000	
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				250,000,000	2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				120,000,000	
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Kab. Mojokerto	Persentase kerja sama antar desa yang berjalan dengan baik	74,5%	250,000,000	Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Kab. Mojokerto	Persentase kerja sama antar desa yang berjalan dengan baik	74,5%	120,000,000	

2.13.03.2.01 - Kegiatan Fasilitas Kerja sama antar Desa					2.13.03.2.01 - Kegiatan Fasilitas Kerja sama antar Desa				
Terfasilitasinya desa dalam Kerja sama antar Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerja sama Antar Desa	220 Desa	250,000,000	Terfasilitasinya desa dalam Kerja sama antar Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerja sama Antar Desa	220 Desa	120,000,000
2.13.03.2.01.0001 - Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten / Kota					2.13.03.2.01.0001 - Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten / Kota				
Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen	125,000,000	Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen	70,000,000
2.13.03.2.01.0002 - Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota					2.13.03.2.01.0002 - Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				
Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50,000,000	Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	0	0
2.13.03.2.01.0003 - Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan					2.13.03.2.01.0003 - Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan				
Terlaksananya Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	75,000,000	Terlaksananya Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	50,000,000
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				12,400,000,000	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				11,243,124,991
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kab. Mojokerto	Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat	93%	12,400,000,000	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kab. Mojokerto	Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat	93%	11,243,124,991
2.13.04.2.01 - Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa					2.13.04.2.01 - Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				

Meningkatnya Kapasitas Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa	Kab. Mojokerto	Persentase Aparatur Pemerintahan Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya	40%	12,050,000,000	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa	Kab. Mojokerto	Persentase Aparatur Pemerintahan Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya	40%	11,138,124,991	
2.13.04.2.01.0001 - Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa					2.13.04.2.01.0001 - Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa					
Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3 Dokumen	100,000,000	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3 Dokumen	50,000,000	
2.13.04.2.01.0002 - Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa					2.13.04.2.01.0002 - Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa					
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	150 Dokumen	100,000,000	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	150 Dokumen	50,000,000	
2.13.04.2.01.0003 - Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa					2.13.04.2.01.0003 - Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa					
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	299 Dokumen	250,000,000	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	299 Dokumen	125,000,000	
2.13.04.2.01.0004 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa					2.13.04.2.01.0004 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa					
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	299 Dokumen	350,000,000	Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	299 Dokumen	130,000,000	
2.13.04.2.01.0005 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa					2.13.04.2.01.0005 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa					
Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	299 Orang	400,000,000	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	299 Orang	100,000,000	

2.13.04.2.01.0006 - Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa					2.13.04.2.01.0006 - Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa					
Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	5 Laporan	200,000,000	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	5 Laporan	100,000,000	
2.13.04.2.01.0009 - Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa					2.13.04.2.01.0009 - Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa					
Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	258 Laporan	750,000,000	Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	258 Laporan	1,310,000,000	
2.13.04.2.01.0010 - Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					2.13.04.2.01.0010 - Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					
Terlaksananya Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	12 Laporan	100,000,000	Terlaksananya Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	12 Laporan	50,000,000	
2.13.04.2.01.0011 - Fasilitasi Penyusunan Profil Desa					2.13.04.2.01.0011 - Fasilitasi Penyusunan Profil Desa					
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	304 Dokum en	200,000,000	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	304 Dokum en	75,000,000	
2.13.04.2.01.0013 - Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa					2.13.04.2.01.0013 - Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa					
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	36 Dokum en	200,000,000	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	36 Dokum en	100,000,000	
2.13.04.2.01.0014 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD					2.13.04.2.01.0014 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD					

Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Mojokerto	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	299 Orang	350,000,000	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Mojokerto	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	299 Orang	190,000,000	
2.13.04.2.01.0015 - Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa					2.13.04.2.01.0015 - Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa					
Terlaksananya Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	75 Desa	150,000,000	Terlaksananya Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	75 Desa	50,000,000	
2.13.04.2.01.0017 - Pelaksanaan Penugasan Urusan / Kewenangan Kabupaten / Kota yang Dilaksanakan oleh Desa					2.13.04.2.01.0017 - Pelaksanaan Penugasan Urusan / Kewenangan Kabupaten / Kota yang Dilaksanakan oleh Desa					
Terlaksananya Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	24 Dokumen	8,400,000,000	Terlaksananya Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	24 Dokumen	8,508,124,991	
2.13.04.2.01.0018 - Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan					2.13.04.2.01.0018 - Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan					
Terlaksananya Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	304 Dokumen	500,000,000	Terlaksananya Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	304 Dokumen	300,000,000	
2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa					2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa					
2.13.04.2.01 - Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa					2.13.04.2.01 - Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa					
Meningkatnya pengembangan BUMDesa	Kab. Mojokerto	Persentase BUMDesa dengan kategori maju	24%	350,000,000	Meningkatnya pengembangan BUMDesa	Kab. Mojokerto	Persentase BUMDesa dengan kategori maju	24%	105,000,000	

Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	100 Dokumen	350,000,000	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	50 Dokumen	105,000,000	
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				2,925,000,000	2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				21,434,100,000	
Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa dalam pembangunan	Kab. Mojokerto	Persentase lembaga kemasyarakatan desa (LKD) yang ditingkatkan kapasitasnya	26%	2,575,000,000	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa dalam pembangunan	Kab. Mojokerto	Persentase lembaga kemasyarakatan desa (LKD) yang ditingkatkan kapasitasnya	26%	21,259,100,000	
Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa	Kab. Mojokerto	Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif	80%	350,000,000	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa	Kab. Mojokerto	Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif	80%	175,000,000	
2.13.05.2.01 - Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten / Kota					2.13.05.2.01 - Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten / Kota					
Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Pengembangan Kegiatan Berbasis Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat	20 Kegiatan	2,575,000,000	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Pengembangan Kegiatan Berbasis Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat	20 Kegiatan	21,259,100,000	
2.13.05.2.01.0002 - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					2.13.05.2.01.0002 - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					

Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	60 Dokumen	550,000,000	Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	60 Dokumen	6,251,500,000	
2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Mojokerto	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	704 Lembaga	500,000,000	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Mojokerto	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	704 Lembaga	13,697,600,000	
2.13.05.2.01.0007 - Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat					2.13.05.2.01.0007 - Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat					
Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	18 laporan	175,000,000	Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	18 laporan	145,000,000	

2.13.05.2.01.0009 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga					2.13.05.2.01.0009 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga					
Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	10 Dokum en	1,100,000,000	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	10 Dokum en	915,000,000	
2.13.05.2.01.0010 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					2.13.05.2.01.0010 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kab. Mojokerto	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	304 Keluarg a	100,000,000	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kab. Mojokerto	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	304 Keluarg a	100,000,000	
2.13.05.2.01.0011 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					2.13.05.2.01.0011 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					

Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kab. Mojokerto	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	150,000,000	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kab. Mojokerto	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Keluarga	150,000,000	
2.13.05.2.01 - Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten / Kota					2.13.05.2.01 - Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten / Kota					
Berkembangnya Lembaga Ekonomi Desa yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi produktif.	Kab. Mojokerto	Persentase Pengembangan produk unggulan desa	15,2%	350,000,000	Berkembangnya Lembaga Ekonomi Desa yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi produktif.	Kab. Mojokerto	Persentase Pengembangan produk unggulan desa	15,2%	175,000,000	
2.13.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa					2.13.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa					
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3 Dokumen	200,000,000	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3 Dokumen	75,000,000	
2.13.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna					2.13.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna					

Terlaksananya Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	150,000,000	Terlaksananya Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	100,000,000	
JUMLAH				22,203,688,09 4					38.922.814.27 1	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunannya, Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto mengacu pada program dan kegiatan prioritas. Selain itu dalam konteks perencanaan yang partisipatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto juga dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada. Sehingga selain berdasar pada dokumen dokumen perencanaan yang ada, Rencana Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto juga disusun berdasarkan Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan isu-isu strategis terkait urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, melalui Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Program Pembinaan & Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, serta Program Pengembangan Nilai Budaya dilakukan upaya-upaya konkrit menjawab isu strategis dimaksud, dengan memperhatikan usulan program/kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Usulan Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dari masyarakat (komunitas masyarakat) diusulkan melalui mekanisme perencanaan Musrenbang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan di tingkat Kabupaten Mojokerto. Hasil usulan melalui Musrenbang Kabupaten Mojokerto untuk tahun 2027 yang terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana table 2.4. berikut :

Tabel 2.4. (T-C. 32)

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2027
Kabupaten Mojokerto**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	258 Desa se Kabupaten Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	258 Laporan	BK Pemilihan Kepala Desa (Bantuan Keuangan Khusus)
2	Pembinaan Administrasi Kelembagaan PKK	Desa Padi, Kab. Mojokerto, Gondang, Padi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Kegiatan	Mengikuti Program Kegiatan Perangkat Daerah
3	Peningkatan Kapasitas TP PKK	Desa padi, Kab. Mojokerto, Gondang, Padi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Kegiatan	Mengikuti Program Kegiatan Perangkat Daerah
4	Program Pemberdayaan BUMDesa (Bantuan Keuangan Khusus)	Jalan Teuku Umar 105 Desa Mojosulur, Kab. Mojokerto, Mojosari, Mojosulur	Jumlah Desa yang mendapat Program Pemberdayaan BUMDesa (Bantuan Keuangan Khusus)	1 Kegiatan	Usulan belum bisa diakomodir

5	Pembinaan Posyandu 6 bidang SPM	Balongmojo, Kab. Mojokerto, Puri, Balongmojo	Jumlah Kader Posyandu Desa yang mendapat pembinaan	1 Kegiatan	Mengikuti Program Kegiatan Perangkat Daerah
6	Pembinaan Administrasi Kelembagaan PKK	Desa Brayung, Kab. Mojokerto, Puri, Brayung	Jumlah Kader PKK Desa yang mendapat pembinaan	1 Kegiatan	Mengikuti Program Kegiatan Perangkat Daerah
7	Pelatihan Manajemen dan pengembangan BUMDesa	Desa Brayung, Kab. Mojokerto, Puri, Brayung	Jumlah Pengurus BUMDesa yang mendapat Pelatihan Ketrampilan Manajemen BUMDesa	1 Kegiatan	Mengikuti Program Kegiatan Perangkat Daerah
8	Pembinaan administrasi pemerintahan desa	Desa Cendoro Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Cendoro	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Kegiatan	Mengikuti Program Kegiatan Perangkat Daerah
9	Program Pemberdayaan BUMDesa (Bantuan Keuangan Khusus)	Dusun Sengon RT.011 RW.002, Kab. Mojokerto, Gondang, Kebontunggul	Jumlah Desa yang mendapat Program Pemberdayaan BUMDesa (Bantuan Keuangan Khusus)	1 Kegiatan	Usulan belum bisa diakomodir
10	Program Pemberdayaan BUMDesa (Bantuan Keuangan Khusus)	Gembongan, Kab. Mojokerto, Gedeg, Gembongan	Jumlah Desa yang mendapat Program Pemberdayaan BUMDesa (Bantuan Keuangan Khusus)	1 Kegiatan	Usulan belum bisa diakomodir
11	Pembinaan Desa Berkinerja Baik dalam pencegahan dan penurunan stunting	Desa Kebonagung , Kab. Mojokerto, Puri, Kebonagung	Jumlah Desa yang mendapat Pembinaan Desa Berkinerja Baik dalam pencegahan dan penurunan stunting	1 Kegiatan	Mengikuti Program Kegiatan Perangkat Daerah
12	Pembinaan Posyandu 6 bidang SPM	Dusun Krangbendo, Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Sumberjati	Jumlah Kader Posyandu Desa yang mendapat pembinaan	1 Kegiatan	Mengikuti Program Kegiatan Perangkat Daerah

13	Pembinaan Posyandu 6 bidang SPM	Dusun Munung RT 001 RW 002 Desa Jumeneng Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Jumeneng	Jumlah Kader Posyandu Desa yang mendapat pembinaan	1 Kegiatan	Mengikuti Program Kegiatan Perangkat Daerah
14	Pembinaan Posyandu 6 bidang SPM	Desa Kwatu Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Kwatu	Jumlah Kader Posyandu Desa yang mendapat pembinaan	1 Kegiatan	Mengikuti Program Kegiatan Perangkat Daerah
15	Pembinaan Desa Berkinerja Baik dalam pencegahan dan penurunan stunting	Jalan Pahlawan No. 142 Trawas-Mojokerto, Kab. Mojokerto, Trawas, Trawas	Jumlah Desa yang mendapat Pembinaan Desa Berkinerja Baik dalam pencegahan dan penurunan stunting	1 Kegiatan	Mengikuti Program Kegiatan Perangkat Daerah
16	Pembinaan Posyandu 6 bidang SPM	Desa Wunut, Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Wunut	Jumlah Kader Posyandu Desa yang mendapat pembinaan	1 Kegiatan	Mengikuti Program Kegiatan Perangkat Daerah
17	Program Pemberdayaan BUMDesa (Bantuan Keuangan Khusus)	Dusun Putat Desa Mojorejo , Kab. Mojokerto, Jetis, Mojorejo	Jumlah Desa yang mendapat Program Pemberdayaan BUMDesa (Bantuan Keuangan Khusus)	1 Kegiatan	Usulan belum bisa diakomodir
18	Pembinaan Posyandu 6 bidang SPM	Desa Ngarjo Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Ngarjo	Jumlah Kader Posyandu Desa yang mendapat pembinaan	1 Kegiatan	Usulan belum bisa diakomodir
19	Pembinaan Posyandu 6 bidang SPM	Dusun Kepuhanyar Desa Kepuhanyar, Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Kepuhanyar	Jumlah Kader Posyandu Desa yang mendapat pembinaan	1 Kegiatan	Mengikuti Program Kegiatan Perangkat Daerah

20	Pembinaan Posyandu 6 bidang SPM	Desa Gebangmalang Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto, Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Gebangmalang	Jumlah Kader Posyandu Desa yang mendapat pembinaan	1 Kegiatan	Mengikuti Program Kegiatan Perangkat Daerah
21	Pembinaan Posyandu 6 bidang SPM	Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar, Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Jabon	Jumlah Kader Posyandu Desa yang mendapat pembinaan	1 Kegiatan	Mengikuti Program Kegiatan Perangkat Daerah
22	Pelatihan Manajemen dan pengembangan BUMDesa	Desa Suru, Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Suru	Jumlah Pengurus BUMDesa yang mendapat Pelatihan Keterampilan Manajemen BUMDesa	1 Kegiatan	Mengikuti Program Kegiatan Perangkat Daerah
23	Pelatihan Keterampilan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Desa suru, Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Suru	Jumlah Kader PKK Desa yang mendapat Pelatihan Keterampilan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	1 Kegiatan	Mengikuti Program Kegiatan Perangkat Daerah
24	Pembinaan Posyandu 6 bidang SPM	Desa suru, Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Suru	Jumlah Kader Posyandu Desa yang mendapat pembinaan	1 Kegiatan	Mengikuti Program Kegiatan Perangkat Daerah
25	Pembinaan Posyandu 6 bidang SPM	Desa Kwedenkembar, Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Kwedenkembar	Jumlah Kader Posyandu Desa yang mendapat pembinaan	1 Kegiatan	Mengikuti Program Kegiatan Perangkat Daerah
26	Program Pemberdayaan BUMDesa (Bantuan Keuangan Khusus)	jl pendidikan no 34, Kab. Mojokerto, Gedeg, Gedeg	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Kegiatan	Usulan belum bisa diakomodir
27	Pembinaan Posyandu 6 bidang SPM	Desa Gayaman, Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Gayaman	Jumlah Kader Posyandu Desa yang mendapat pembinaan	1 Kegiatan	Mengikuti Program Kegiatan Perangkat Daerah

28	Pembinaan Posyandu 6 bidang SPM	Desa Sadartengah, Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Sadartengah	Jumlah Kader Posyandu Desa yang mendapat pembinaan	1 Kegiatan	Mengikuti Program Kegiatan Perangkat Daerah
29	Peningkatan Kapasitas TP PKK	Jalan Pahlawan No. 142 Trawas-Mojokerto, Kab. Mojokerto, Trawas, Trawas	Jumlah Kader PKK Desa yang mendapat peningkatan Kapasitas	1 Kegiatan	Mengikuti Program Kegiatan Perangkat Daerah
30	Pembinaan Posyandu 6 bidang SPM	Desa Lengkong Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, Kab. Mojokerto, Mojoanyar, Lengkong	Jumlah Kader Posyandu Desa yang mendapat pembinaan	1 Kegiatan	Mengikuti Program Kegiatan Perangkat Daerah

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren (wajib dan pilihan) yang dilaksanakan oleh perangkat daerah diwadahi dalam kelembagaan dinas daerah. Sedangkan kelembagaan badan daerah adalah untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta fungsi lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan Undang-undang no 23 tahun 2014, pasal 12, point g, merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Fasilitas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan satu kesatuan (i) Tata Kelola Pemerintahan Desa, (ii) Tata Kelola Lembaga Kemasyarakatan dan (iii) Tata Kelola ekonomi dan lingkungan, adapun Lokus Pemberdayaan masyarakat desa adalah desa.

Desa yang beberapa dekade menjadi obyek pembangunan, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi memiliki banyak keistimewaan sebagai subyek pembangunan. Alokasi Dana Desa dan dana desa yang bersumber dari APBN menjadi salah satu sumber APBDesa yang menjanjikan bergeraknya roda pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa menjadi lebih aktif dan dinamis. Kewenangan kepala desa dan perangkat desa yang diimbangi dengan perolehan gaji serta penghasilan tetap yang diatur dalam undang-undang desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para pamong desa ini sehingga dapat lebih kerja dalam melayani

masyarakatnya. Kewenangan dan alokasi dana yang besar yang diamanatkan UU Desa itu, tidak ada satu pasal pun yang mengisyaratkan monopoli kebijakan Kepala Desa, Kepala Desa akan memikul tanggung jawab yang lebih besar untuk mempertanggungjawabkan semua kewenangan dan pengelolaan dana dimaksud.

Dari sekian banyak Undang-Undang yang mengatur tentang Desa sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dapat menjadi pilihan yang sangat partisipatif mengedepankan desa. Desa sebagai ujung tombak pemerintahan terbawah memiliki otonomi dalam mengatur pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya harus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur pemerintahan Desa harus bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat Undang-Undang agar Kepala Desa tidak terjebak dalam jeratan hukum. Masyarakat Desa diharapkan juga ikut mengawasi dan mengambil peran aktif melalui musyawarah desa agar pelaksanaan pembangunan bisa benar-benar efektif dan tepat sasaran serta dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kewenangan dalam bimbingan dan pengawasan melekat pada Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, hal ini menjadikan organisasi perangkat daerah yang menangani urusan konkuren terkait dengan desa menjadi penting.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2027, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa ini bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, secara Nasional, tingkat Provinsi maupun di tingkat Daerah.

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2027, sebagai berikut:

TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2027 :

“Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri”

Yang diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi: Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan angka menengah tahun 2025-2029, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;**
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Sedangkan Prioritas Pembangunan Nasional pada RKP tahun 2027 yang sangat terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto terdapat pada **Prioritas ke-6**, yaitu **“Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan”**, dengan arah kebijakan yang kesemuanya bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan Tema Pembangunan dalam Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 adalah :

“Penguatan Pelayanan Dasar untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”

Sedangkan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 adalah :

- 1. Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan.**
2. Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas.
3. Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan..
4. Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan..
5. Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan..
6. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan.
7. Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif.
8. Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.
9. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.

Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur pada RKPD tahun 2027 yang sangat terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto terdapat pada Prioritas ke-1, yaitu **“Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan.”**,

dengan arah kebijakan yang kesemuanya juga bermuara pada kesejahteraan sosial masyarakat

Adapun Tema Pembangunan berdasarkan rancangan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2027, adalah :

“HILIRISASI SDA DAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR MENUJU TRANSFORMASI EKONOMI HIJAU DAN PUSAT PEMERINTAHAN BARU YANG BERKELANJUTAN”

Sedangkan rancangan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 adalah :

1. Peningkatan daya saing SDM yang berkualitas dan berkarakter;
- 2. Penguatan ketahanan ekonomi daerah melalui pemerataan pendapatan dan penurunan kemiskinan;**
3. Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur di semua sektor menuju pusat Pemerintahan baru yang berkelanjutan ;
4. Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital yang terintegrasi untuk meningkatkan kepuasan pelayanan publik;

Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada RKPD tahun 2027 yang sangat terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto terdapat pada Prioritas ke-2, yaitu :

“Penguatan ketahanan ekonomi daerah melalui pemerataan pendapatan dan penurunan kemiskinan”

dengan arah kebijakan yang kesemuanya juga bermuara pada kesejahteraan sosial masyarakat

Memperhatikan arah kebijakan Nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2027, Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2027 mendukung secara tidak langsung Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur maupun Kabupaten Mojokerto. Adapun Program Prioritas Perangkat Daerah yang mensupport pencapaian prioritas Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur dan Prioritas Nasional adalah Program Penataan Desa, Program Kerja sama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa, serta Program

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat.

Sedangkan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto mengacu pada Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam RKP dan RKPD Tahun 2027 adalah:

1. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana desa, kerja sama desa serta keswadayaan masyarakat desa.
2. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis dan akuntabel serta meningkatkan tata kelola pemerintahan desa berbasis Teknologi Informasi
3. Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga adat desa serta peningkatan kapasitas SDM Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat.
4. Peningkatan lembaga ekonomi desa, pengembangan usaha ekonomi masyarakat serta Peningkatan akses masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi tepat guna.
5. Mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

A. Tujuan.

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

- 1) Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir renstra ;
- 2) Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi ;
- 3) Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah,

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan sebagai berikut :

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan pada kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang sebagai berikut:

Untuk mewujudkan **Misi 3 : “Membangun kemandirian ekonomi bagi industri pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat.”**. maka ditetapkan tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, yaitu :

“Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa”.

Dengan indikator tujuan : “ **Indeks Desa** “

B. Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria *specific, measurable, aggressive but attainable, result oriented* dan *time bond*. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Untuk mewujudkan tujuan dari **Misi - 3**, ditetapkan sasaran Perangkat Daerah :

Sasaran 1 : “Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik”

Indikator sasaran : Nilai Indeks Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa

Sasaran 2 : “Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat Pedesaan”

Indikator sasaran : Nilai Indeks Dimensi Sosial Desa

Sasaran 3 : “Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat Pedesaan”

Indikator sasaran : Nilai Indeks Dimensi Ekonomi Desa

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2027, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto menetapkan sasaran pembangunan dengan rincian sebagaimana tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1.

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Tahun 2027

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di desa		Indeks Desa	84.38
		Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik	Nilai Indeks Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa	10.63
		Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat Pedesaan	Nilai Indeks Dimensi Sosial Desa	11.31
		Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat Pedesaan	Nilai Indeks Dimensi Ekonomi Desa	20.67
		Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,7

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka disusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Renja DPMD) Tahun 2027. Renja DPMD merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran DPMD (RKA DPMD) Tahun 2027.

Di dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2027 yang telah disusun dan dibahas dalam Forum Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Kabupaten Mojokerto memuat **5 program, 10 kegiatan dan 33 sub kegiatan** yang akan dilaksanakan oleh DPMD Kabupaten Mojokerto pada 1 (satu) tahun ke depan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 38.922.814.271,-** berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2027 (RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2027). Untuk itu seluruh program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan permasalahan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Mojokerto yang menjadi ruang lingkup DPMD dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran. Berdasarkan prioritas pembangunan yang didasarkan pada pencapaian pembangunan sampai dengan 2027 dan prediksi pelaksanaan pembangunan satu tahun kedepan, maka Renja DPMD pada tahun 2027 ini akan diarahkan untuk kegiatan yang menunjang :

1. Peningkatan pelaksanaan pembinaan, kerjasama dengan Badan/Dinas lain di seluruh kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka mencapai tertib pelaksanaan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan;
2. Peningkatan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Badan/Dinas lain di bidang Penataan dan Kerjasama Desa, Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adat Desa, Bidang Bina Pemerintahan Desa, serta Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa;
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana dan pengelola di DPMD bidang Penataan dan Kerjasama Desa, Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adat Desa, Bidang Bina Pemerintahan Desa, serta Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa;

4. Peningkatan pelaksanaan dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan serta penyampaian laporan seluruh kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Kepala Daerah.

Adapun program dan kegiatan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Sasaran Program : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan

Program yang dilaksanakan meliputi kegiatan:

- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Perangkat Daerah Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sasaran Kegiatan : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penataan Desa

Sasaran Program : Meningkatnya Kualitas Penataan Desa

Program ini mendukung kebijakan untuk Penataan Desa dengan kegiatan:

Penyelenggaraan Penataan desa.

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya desa yang tertata

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

3. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Sasaran Program : Meningkatnya efektivitas kerja sama antar desa

Program ini mendukung pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kerja sama antar desa dengan Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa

Sasaran Kegiatan : Terfasilitasinya desa dalam Kerja sama antar Desa

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

4. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Sasaran Program : Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa.

Program ini mendukung kebijakan Penguatan fungsi kapasitas Pemerintahan Desa dan pelatihan aparatur Pemerintahan Desa dengan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Sasaran Kegiatan :

- a) Meningkatnya Kapasitas Aparatur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

b) Meningkatnya pengembangan BUMDesa

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
- Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
- Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
- Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
- Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
- Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa
- Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat

Sasaran Program :

- 1) Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa dalam pembangunan
- 2) Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa

Program ini mendukung kebijakan Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan fungsi Kapasitas Lembaga kemasyarakatan serta bertujuan untuk meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan kapasitas SDM melalui pelatihan pemberdayaan masyarakat. Program ini juga mendukung kebijakan mempermudah akses Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM), menguatkan fungsi lembaga perekonomian masyarakat. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan usaha

ekonomi masyarakat, pengembangan lembaga ekonomi perdesaan serta untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pendayagunaan SDA dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar dan pengembangan TTG. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Sasaran Kegiatan :

- 1) Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa
- 2) Berkembangnya Lembaga Ekonomi Desa yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi produktif

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
- Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
- Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Adapun Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 serta Prakiraan Maju Tahun 2027 sebagaimana tabel 3.2. berikut :

Tabel 3.2. (T-C. 33)

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2027			SUMBER DANA	CATATAN PENTTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028	
		LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Kab. Mojokerto		5,950,589,280	APBD II			6,553,688,094
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	Kab. Mojokerto	90,9	5,950,589,280	APBD II		91.0	6,553,688,094
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		94,4%				94,5%	
2.13.01.2.01 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kinerja Perangkat Daerah yang tercapai	Kab. Mojokerto	94%	-	APBD II		94%	40,000,000
2.13.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								

	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	0	-	APBD II		3 Dokumen	20,000,000
	2.13.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	0	-	APBD II		18 laporan	20,000,000
2.13.01.2.02 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Kab. Mojokerto						
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	Kab. Mojokerto	100%	5,079,203,680	APBD II		100%	5,288,038,094
	2.13.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS								
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mojokerto	34 Orang/ 14 bulan	5,079,203,680	APBD II		35 Orang/ 14 bulan	5,288,038,094
2.13.01.2.05 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Kab. Mojokerto						
	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	84.8	-	APBD II		84.85	85,000,000
	2.13.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Mojokerto	0	-	APBD II		35 paket	35,000,000
	2.13.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								

	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Mojokerto	0	-	APBD II		35 orang	50,000,000
2.13.01.2.06 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			Kab. Mojokerto						
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	Kab. Mojokerto	90%	390,600,000	APBD II		90%	553,000,000
	2.13.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Mojokerto	4 Paket	150,000,000	APBD II		4 Paket	185,000,000
	2.13.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Mojokerto	24 Paket	24,000,000	APBD II		24 Paket	62,000,000
	2.13.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Mojokerto	4 Paket	20,000,000	APBD II		4 Paket	55,000,000
	2.13.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan								
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Mojokerto	12 Dokumen	4,000,000	APBD II		12 Dokumen	6,000,000
	2.13.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan / Material								

	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Mojokerto	4 Paket	102,000,000	APBD II		4 Paket	105,000,000
	2.13.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mojokerto	72 Laporan	90,600,000	APBD II		72 Laporan	140,000,000
2.13.01.2.07 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	Kab. Mojokerto	100%	-			100%	55,000,000
	2.13.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel								
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Mojokerto	0	-	APBD II		2 unit	55,000,000
2.13.01.2.08 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Kab. Mojokerto						
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	Kab. Mojokerto	90%	220,785,600	APBD II		90%	200,900,000
	2.13.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					APBD II			
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Mojokerto	0	-	APBD II		12 Laporan	8,900,000
	2.13.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					APBD II			

	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Mojokerto	12 Laporan	220,785,600	APBD II		12 Laporan	192,000,000
2.13.01.2.09 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Kab. Mojokerto			APBD II			
	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	Kab. Mojokerto	90%	260,000,000	APBD II		90%	331,750,000
	2.13.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					APBD II			
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Mojokerto	12 Unit	195,000,000	APBD II		12 Unit	171,750,000
	2.13.01.2.09.0009 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					APBD II			
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Mojokerto	1 Unit	45,000,000			1 Unit	125,000,000
	2.13.01.2.09.0010 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					APBD II			
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Mojokerto	20 Unit	20,000,000	APBD II		20 Unit	35,000,000
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA			Kab. Mojokerto		175,000,000	APBD II			200,000,000

	Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase desa dengan penataan desa sesuai ketentuan	Kab. Mojokerto	55%	175,000,000	APBD II		70%	200,000,000
2.13.02.2.01 - Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa			Kab. Mojokerto			APBD II			
	Meningkatnya Desa yang Tertata	Jumlah desa yang sudah tertata sesuai dengan ketentuan	Kab. Mojokerto	164 Desa	175,000,000	APBD II		209 Desa	200,000,000
	2.13.02.2.01.0006 - Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa					APBD II			
	Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Kab. Mojokerto	5 Unit	175,000,000	APBD II		5 Unit	200,000,000
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA			Kab. Mojokerto		120,000,000	APBD II			250,000,000
	Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase kerja sama antar desa yang berjalan dengan baik	Kab. Mojokerto	74,5%	120,000,000	APBD II		75%	250,000,000
2.13.03.2.01 - Kegiatan Fasilitas Kerja sama antar Desa			Kab. Mojokerto			APBD II			
	Terfasilitasinya desa dalam Kerja sama antar Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerja sama Antar Desa	Kab. Mojokerto	220 Desa	120,000,000	APBD II		220 Desa	250,000,000
	2.13.03.2.01.0001 - Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten / Kota					APBD II			
	Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	2 Dokumen	70,000,000	APBD II		2 Dokumen	125,000,000
	2.13.03.2.01.0002 - Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota								

	Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	0	0			1 Dokumen	50,000,000
	2.13.03.2.01.0003 - Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan								
	Terlaksananya Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Mojokerto	1 Dokumen	50,000,000			1 Dokumen	75,000,000
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			Kab. Mojokerto		11,243,124,991				12,600,000,000
	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat	Kab. Mojokerto	93%	11,243,124,991			93%	12,600,000,000
2.13.04.2.01 - Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			Kab. Mojokerto						
	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Pemerintahan Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Mojokerto	40%	11,138,124,991			45%	12,200,000,000
	2.13.04.2.01.0001 - Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa								
	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Mojokerto	3 Dokumen	50,000,000			3 Dokumen	150,000,000
	2.13.04.2.01.0002 - Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa								
	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Mojokerto	150 Dokumen	50,000,000			150 Dokumen	150,000,000
	2.13.04.2.01.0003 - Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa								

	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Mojokerto	299 Dokumen	125,000,000			557 Dokumen	400,000,000
	2.13.04.2.01.0004 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa								
	Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Mojokerto	299 Dokumen	130,000,000			299 Dokumen	400,000,000
	2.13.04.2.01.0005 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa								
	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kab. Mojokerto	299 Orang	100,000,000			598 Orang	650,000,000
	2.13.04.2.01.0006 - Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa								
	Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kab. Mojokerto	5 Laporan	100,000,000			5 Laporan	250,000,000
	2.13.04.2.01.0009 - Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa								
	Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Mojokerto	258 Laporan	1,310,000,000				-
	2.13.04.2.01.0010 - Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa								
	Terlaksananya Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Mojokerto	12 Laporan	50,000,000			12 Laporan	150,000,000

2.13.04.2.01.0011 - Fasilitas Penyusunan Profil Desa								
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Kab. Mojokerto	304 Dokumen	75,000,000			304 Dokumen	200,000,000
2.13.04.2.01.0013 - Fasilitas Pengelolaan Aset Desa								
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Kab. Mojokerto	36 Dokumen	100,000,000			36 Dokumen	250,000,000
2.13.04.2.01.0014 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD								
Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kab. Mojokerto	299 Orang	190,000,000			299 Orang	400,000,000
2.13.04.2.01.0015 - Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa								
Terlaksananya Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Kab. Mojokerto	75 Desa	50,000,000			75 Desa	150,000,000
2.13.04.2.01.0017 - Pelaksanaan Penugasan Urusan / Kewenangan Kabupaten / Kota yang Dilaksanakan oleh Desa								
Terlaksananya Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Kab. Mojokerto	24 Dokumen	8,508,124,991			24 Dokumen	8,500,000,000
2.13.04.2.01.0018 - Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan								

	Terlaksananya Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Mojokerto	304 Dokumen	300,000,000			304 Dokumen	550,000,000
	2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa								
2.13.04.2.01 - Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa									
	Meningkatnya pengembangan BUMDesa	Persentase BUMDesa dengan kategori maju	Kab. Mojokerto	24%	105,000,000			26%	400,000,000
	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa		50 Dokumen	105,000,000			100 Dokumen	400,000,000
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					21,434,100,000				3,050,000,000
	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa (LKD) yang ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Mojokerto	26%	21,434,100,000			28%	2,650,000,000
	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa	Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif	Kab. Mojokerto	80%	175,000,000			80%	400,000,000
	2.13.05.2.01 - Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten / Kota		Kab. Mojokerto						
	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang	Jumlah Pengembangan Kegiatan Berbasis Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat	Kab. Mojokerto	20 Kegiatan	21,259,100,000			21 Kegiatan	2,650,000,000

Pemberdayaan Desa									
2.13.05.2.01.0002 - Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat									
Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Mojokerto	60 Dokumen	6,251,500,000			60 Dokumen	550,000,000	
2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat									
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Mojokerto	704 Lembaga	13,697,600,000			704 Lembaga	525,000,000	
2.13.05.2.01.0007 - Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat									

	Terlaksananya Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Mojokerto	18 laporan	145,000,000			18 laporan	175,000,000
	2.13.05.2.01.0009 - Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga								
	Terlaksananya Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Mojokerto	10 Dokumen	915,000,000			10 Dokumen	1,100,000,000
	2.13.05.2.01.0010 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat								
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kab. Mojokerto	304 Keluarga	100,000,000			304 Keluarga	100,000,000
	2.13.05.2.01.0011 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing								
	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kab. Mojokerto	100 Keluarga	150,000,000			100 Keluarga	200,000,000

2.13.05.2.01 - Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten / Kota								
Berkembangnya Lembaga Ekonomi Desa yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi produktif.	Persentase Pengembangan produk unggulan desa	Kab. Mojokerto	15,2%	175,000,000			16,7%	400,000,000
2.13.05.2.01.0005 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa								
Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Mojokerto	3 Dokumen	75,000,000			3 Dokumen	225,000,000
2.13.05.2.01.0006 - Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna								
Terlaksananya Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Mojokerto	3 Laporan	100,000,000			3 Laporan	175,000,000
JUMLAH				38,922,814,271				22,653,688,094

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2027 berisi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2027 untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan OPD, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja dan target kinerja program pembangunan OPD. Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja organisasi maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah,
- 2) Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan,
- 3) Memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah,
- 4) Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2027 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN dapat diuraikan sebagaimana dalam tabel 4.1. berikut:

TABEL 4.1

**REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2027
SESUAI RANCANGAN AKHIR RENJA 2027**

KODE SKPD : 2.13

NAMA SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

URUSAN / BIDANG URUSAN PMDA / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	U P	B / L	INDIKATOR KINERJA				LOKASI	APBD KAB (Rp).	APBD PROV		USULAN APBN		
			OUTPUT SUB KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	OUTCOME PROGRAM	TAR GET			SKPD Terka it	Pa gu (Rp)	KL	Rp	D/TB / DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA													
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							Kab. Mojokert o	5,950,589,280	-	0	-	0	-
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan					Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	90,9	Kab. Mojokert o	5,950,589,280					
					Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94,4%			-	0	-	0	-
2.13.01.2.02 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							Kab. Mojokert o		-	0	-	0	-

	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Perangkat Daerah				Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti		100%	Kab. Mojokerto	5,079,203,680	-	0	-	0	-
	2.13.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS									-	0	-	0	-
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			34 Orang/ 14 bln	Kab. Mojokerto	5,079,203,680	-	0	-	0	-
	2.13.01.2.06 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah							Kab. Mojokerto		-	0	-	0	-
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Perangkat Daerah				Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar		90%	Kab. Mojokerto	390,600,000	-	0	-	0	-
	2.13.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									-	0	-	0	-
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 Paket	Kab. Mojokerto	150,000,000	-	0	-	0	-
	2.13.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor									-	0	-	0	-
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			24 Paket	Kab. Mojokerto	24,000,000	-	0	-	0	-
	2.13.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									-	0	-	0	-
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			4 Paket	Kab. Mojokerto	20,000,000	-	0	-	0	-
	2.13.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									-	0	-	0	-

	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12 Dokumen	Kab. Mojokerto	4,000,000	-	0	-	0	-
	2.13.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan / Material									-	0	-	0	-
	Tersedianya Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			4 Paket	Kab. Mojokerto	102,000,000	-	0	-	0	-
	2.13.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									-	0	-	0	-
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			72 Laporan	Kab. Mojokerto	90,600,000	-	-	-	-	-
	2.13.01.2.08 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Kab. Mojokerto		-	0	-	0	-
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan		90%	Kab. Mojokerto	220,785,600	-	0	-	0	-
	2.13.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									-	0	-	0	-
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	Kab. Mojokerto	220,785,600	-	0	-	0	-
	2.13.01.2.09 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Kab. Mojokerto		-	0	-	0	-

	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah				Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik		90%	Kab. Mojokerto	260,000,000	-	0	-	0	-
	2.13.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									-	0	-	0	-
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			12 Unit	Kab. Mojokerto	195,000,000	-	0	-	0	-
	2.13.01.2.09.0009 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									-	0	-	0	-
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	Kab. Mojokerto	45,000,000	-	0	-	0	-
	2.13.01.2.09.0010 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									-	0	-	0	-
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			20 Unit	Kab. Mojokerto	20,000,000	-	0	-	0	-
	2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA							Kab. Mojokerto	175,000,000	-	0	-	0	-
	Meningkatnya kualitas penataan desa				Persentase desa dengan penataan desa sesuai ketentuan		55%	Kab. Mojokerto	175,000,000	-	0	-	0	-

2.13.02.2.01 - Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa							Kab. Mojokerto		-	0	-	0	-
	Meningkatnya Desa yang Tertata			Jumlah desa yang sudah tertata sesuai dengan ketentuan		164 Desa	Kab. Mojokerto	175,000,000	-	0	-	0	-
	2.13.02.2.01.0006 - Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa								-	0	-	0	-
	Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa			Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi		5 Unit	Kab. Mojokerto	175,000,000	-	0	-	0	-
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA							Kab. Mojokerto	120,000,000	-	0	-	0	-
	Meningkatnya efektivitas kerja sama desa				Persentase kerja sama antar desa yang berjalan dengan baik	74,5%	Kab. Mojokerto	120,000,000	-	0	-	0	-
2.13.03.2.01 - Kegiatan Fasilitas Kerja sama antar Desa							Kab. Mojokerto						
	Terfasilitasinya desa dalam Kerja sama antar Desa			Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerja sama Antar Desa		220 Desa	Kab. Mojokerto	120,000,000					
	2.13.03.2.01.0001 - Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten / Kota												
	Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota		2 Dokumen	Kab. Mojokerto	70,000,000					
	2.13.03.2.01.0002 - Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota												
	Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota		0	Kab. Mojokerto	0					

	2.13.03.2.01.0003 - Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan												
	Terlaksananya Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan			1 Dokumen	Kab. Mojokerto	50,000,000				
	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA							Kab. Mojokerto	11,243,124,991				
	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa					Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat	93%	Kab. Mojokerto	11,243,124,991				
	2.13.04.2.01 - Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa							Kab. Mojokerto					
	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa				Persentase Aparatur Pemerintahan Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya		40%	Kab. Mojokerto	11,138,124,991				
	2.13.04.2.01.0001 - Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa												
	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			3 Dokumen	Kab. Mojokerto	50,000,000				
	2.13.04.2.01.0002 - Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa												
	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa			150 Dokumen	Kab. Mojokerto	50,000,000				

2.13.04.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa													
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa			299 Dokum en	Kab. Mojokerto	125,000,000					
2.13.04.2.01.0004 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa													
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			299 Dokum en	Kab. Mojokerto	130,000,000					
2.13.04.2.01.0005 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa													
Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas			299 Orang	Kab. Mojokerto	100,000,000					
2.13.04.2.01.0006 - Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa													
Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa			Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa			5 Lapora n	Kab. Mojokerto	100,000,000					
2.13.04.2.01.0009 - Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa													
Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa			258 Lapora n	Kab. Mojokerto	1,310,000,000					
2.13.04.2.01.0010 - Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa													

	Terlaksananya Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			12 Laporan	Kab. Mojokerto	50,000,000					
	2.13.04.2.01.0011 - Fasilitas Penyusunan Profil Desa													
	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Profil Desa			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun			304 Dokumen	Kab. Mojokerto	75,000,000					
	2.13.04.2.01.0013 - Fasilitas Pengelolaan Aset Desa													
	Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Aset Desa			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa			36 Dokumen	Kab. Mojokerto	100,000,000					
	2.13.04.2.01.0014 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD													
	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas			299 Orang	Kab. Mojokerto	190,000,000					
	2.13.04.2.01.0015 - Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa													
	Terlaksananya Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa			75 Desa	Kab. Mojokerto	50,000,000					
	2.13.04.2.01.0017 - Pelaksanaan Penugasan Urusan / Kewenangan Kabupaten / Kota yang Dilaksanakan oleh Desa													
	Terlaksananya Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa			Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa			24 Dokumen	Kab. Mojokerto	8,508,124,991					

2.13.04.2.01.0018 - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan													
Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			304 Dokum en	Kab. Mojokerto	300,000,000					
2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa													
2.13.04.2.01 - Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa													
Meningkatnya pengembangan BUMDesa					Persentase BUMDesa dengan kategori maju	24%	Kab. Mojokert o	105,000,000					
Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa			50 Dokum en		105,000,000					
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								21,434,100,00 0					
Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa dalam pembangunan					Persentase lembaga kemasyarakatan desa (LKD) yang ditingkatkan kapasitasnya	26%	Kab. Mojokert o	21,259,100,00 0					

	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa				Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif	80%	Kab. Mojokerto	175,000,000					
	2.13.05.2.01 - Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten / Kota						Kab. Mojokerto						
	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa			Jumlah Pengembangan Kegiatan Berbasis Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat		20 Kegiatan	Kab. Mojokerto	21,259,100,000					
	2.13.05.2.01.0002 - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat												

Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			60 Dokumen	Kab. Mojokerto	6,251,500,000					
2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat													
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			704 Lembaga	Kab. Mojokerto	13,697,600,000					
2.13.05.2.01.0007 - Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat													
Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			18 laporan	Kab. Mojokerto	145,000,000					

2.13.05.2.01.0009 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga													
Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			10 Dokum en	Kab. Mojokerto	915,000,000					
2.13.05.2.01.0010 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat													
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			304 Keluarg a	Kab. Mojokerto	100,000,000					
2.13.05.2.01.0011 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing													
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			100 Keluarg a	Kab. Mojokerto	150,000,000					

2.13.05.2.01 - Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten / Kota													
	Berkembangnya Lembaga Ekonomi Desa yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi produktif.			Persentase Pengembangan produk unggulan desa		15,2'	Kab. Mojokerto	175,000,000					
	2.13.05.2.01.0005 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa												
	Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		3 Dokumen	Kab. Mojokerto	75,000,000					
	2.13.05.2.01.0006 - Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna												
	Terlaksananya Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		3 Laporan	Kab. Mojokerto	100,000,000					
	JUMLAH							38,922,814,271					

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2027. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2027 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, baik dalam kerangka regulasi atau mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antara kegiatan satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan dibawah lingkup DPMD, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi, baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2027 sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto. Sedangkan landasan operasional berupa dokumen perencanaan tahunan bagi Perangkat Daerah adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun action plan yaitu Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) dalam rangka hal tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto

menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang ditingkat desa, Musrenbang Kecamatan ditingkat Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten ditingkat Kabupaten.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sebagaimana amanat Permendagri nomor 86 tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2027 sebagai berikut:

- a. Di dalam Penyusunan Renja DPMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2027 memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus dilakukan pemetaan/mapping menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- b. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2027 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Timur maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/ mepedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RKP, RPJMN, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kabupaten Mojokerto, RPJMD Kabupaten Mojokerto, RKPD Kabupaten Mojokerto dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. Melaksanakan Renja Tahun 2027 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2027.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

- a. Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2027, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan unit kerja di Perangkat Daerah, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Mojokerto, Juli 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MOJOKERTO



SUGENG NURYADI, SIP., M.M.

Rembina Tk. I

NIP. 19681010 198903 1 008